



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TIN LATIFAH
2. Jabatan : INSPEKTUR II
3. NHK : 110853

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.040.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/85 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/170 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Bangunan Seluas 78.15 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/45 m2 di BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 77.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 100.900.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 515.921.434

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.734.321.434

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.734.321.434

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.